

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan ekonomi melibatkan transformasi yang meliputi struktur ekonomi, sikap hidup masyarakat, dan sistem lembaga. Proses ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga mempertimbangkan perbedaan dalam potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia di setiap wilayah. Ketidakmerataan ini, bersama dengan perbedaan kinerja ekonomi antar daerah, seringkali mengakibatkan ketimpangan pembangunan yang signifikan antar wilayah (Dulkiah 2020).

Kriminalitas atau tindakan pidana merujuk pada perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku (Audey, R. P. 2017). Kriminalitas mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari pencurian, penipuan, kekerasan, hingga korupsi dan kejahatan terorganisir (Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan 2021).

Sosiologi kriminal merupakan cabang ilmu yang memfokuskan kajiannya pada fenomena kejahatan sebagai suatu gejala sosial dimana disiplin ini mengeksplorasi faktor-faktor sosial yang menjadi pemicu munculnya reaksi dari masyarakat terhadap kejahatan, serta dampak yang ditimbulkannya (Situmaeng 2021). Sosiologi kriminal memusatkan perhatiannya pada kondisi sosial dan ekonomi yang kurang baik sebagai penyebab munculnya tindak kejahatan.

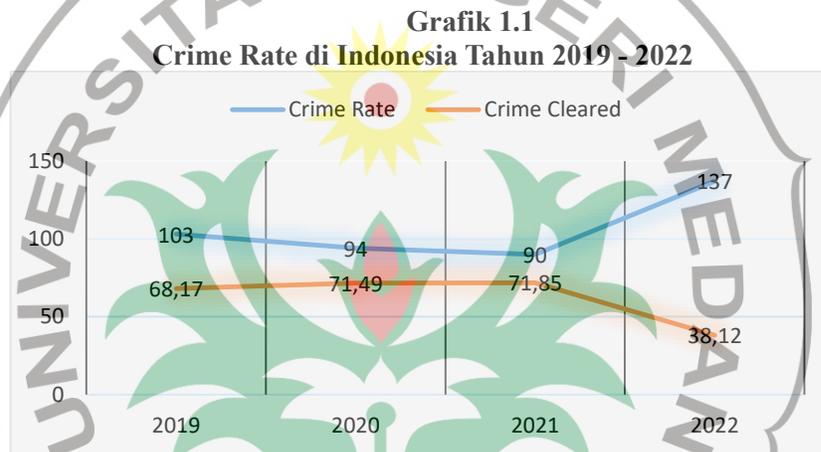
Perkembangan ekonomi dianggap sebagai aspek fundamental yang menentukan seluruh struktur sosial dan budaya, dan oleh karena itu, memengaruhi segala urusan di dalam struktur tersebut. Pandangan kriminologi kuno menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil yang dapat diharapkan dari kesengsaraan yang meluas. Tindakan kriminalitas masih sering terjadi di seluruh provinsi Indonesia dimana hampir setiap hari berita di media tv, koran, radio memberitakan tentang tindakan kriminalitas sehingga kriminalitas menjadi permasalahan yang belum bisa kita hindari.

Kejahatan dianggap sebagai gejala sosial yang selalu relevan untuk diteliti, terutama mengingat terus berkembangnya kejahatan seiring dengan evolusi kehidupan manusia. Setiap tahun, jumlah kejahatan yang dilakukan oleh individu sulit dihitung karena melibatkan banyak peristiwa, dan jutaan pelaku kejahatan dihukum sebagai akibatnya sementara dari perspektif ekonomi, dampak negatif terhadap masyarakat sangat besar (Purba, Basri, and Siregar 2017).

Adapun indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu wilayah dalam waktu tertentu adalah menggunakan crime rate. Crime rate adalah angka yang menunjukkan jumlah kejahatan per unit populasi dalam suatu periode tertentu (Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan 2021).

Semakin tinggi angka crime rate, maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula. Sebaliknya, jika crime rate rendah, maka wilayah tersebut dianggap lebih aman dari ancaman kejahatan.

Adapun keadaan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2019-2022 cenderung mengalami fluktuasi peningkatan yang cukup signifikan terutama di tahun 2022 yang dapat dilihat melalui grafik berikut :



Sumber : Statistik dan Keamanan Indonesia

Dalam tabel indikator risiko penduduk terkena tindak kejahatan (crime rate) di atas, terlihat bahwa kriminalitas di Indonesia sempat mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2021. Namun, kemudian terjadi lonjakan tajam pada tahun 2022. Tingkat risiko penduduk terkena kejahatan (crime rate) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dari setiap 100.000 penduduk, terdapat 137 orang yang menjadi korban kejahatan.

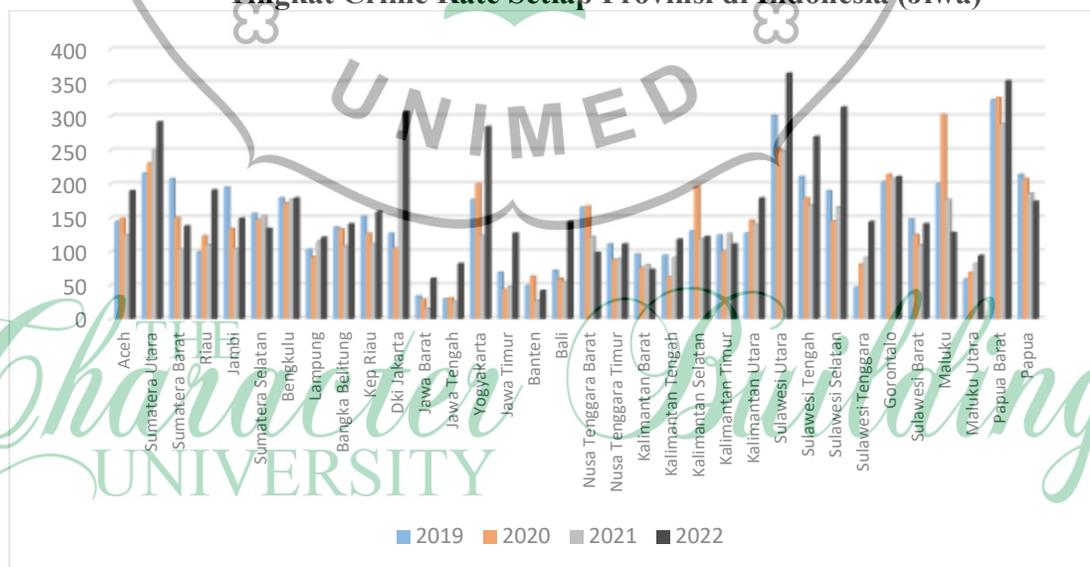
Di sisi lain, penyelesaian perkara justru mengalami penurunan yang signifikan.

Pada tahun 2021, Korps Bhayangkara berhasil menyelesaikan 202.024 kasus, sedangkan pada tahun 2022 hanya berhasil menyelesaikan 200.147 kasus. Adapun jenis kejahatan yang paling sering terjadi sepanjang periode 2014–2022 adalah pencurian, dengan persentase kasus mencapai kisaran 26–45 persen dari total

desa/kelurahan di Indonesia. Jenis kejahatan ini menjadi masalah utama di banyak wilayah, mencerminkan tantangan signifikan dalam upaya penegakan hukum dan keamanan masyarakat. Sementara itu, kejahatan pelecehan seksual mencatatkan persentase korban terendah.

Kenaikan tajam dalam **crime rate** dan penurunan penyelesaian perkara menunjukkan adanya tantangan besar bagi keamanan di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk mengurangi kejahatan, peningkatan **crime rate** pada tahun 2022 menunjukkan bahwa upaya tersebut mungkin belum cukup efektif dalam mengentas kejahatan.

Grafik 1.2
Tingkat Crime Rate Setiap Provinsi di Indonesia (Jiwa)



Sumber : Statistik dan Keamanan Indonesia

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa tingkat risiko penduduk terkena kejahatan (**crime rate**) di setiap provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi dan meningkat cukup tajam pada tahun 2022 di sebagian besar provinsi.

Provinsi Sulawesi Utara tercatat memiliki nilai crime rate tertinggi di tahun 2022, yaitu sebesar 364 per 100.000 penduduk, diikuti oleh Provinsi Papua Barat dengan 353 per 100.000 penduduk, dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan 314 per 100.000 penduduk. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebut memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kejahatan pada tahun tersebut.

Di sisi lain, Polda Jawa Timur meskipun memiliki jumlah kejahatan tertinggi, termasuk dalam kelompok dengan crime rate rendah, dengan nilai sebesar 127 per 100.000 penduduk. Hal ini disebabkan oleh pengaruh jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur yang besar, sehingga meskipun jumlah absolut kejahatan tinggi, angka crime rate relatif lebih rendah dibandingkan provinsi dengan jumlah penduduk lebih kecil.

Fenomena ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi perhitungan crime rate dan penting untuk mempertimbangkan faktor kepadatan penduduk saat menganalisis data kriminalitas. Adanya peningkatan crime rate di banyak provinsi pada tahun 2022 mengindikasikan perlunya perhatian khusus dari pihak berwenang untuk memahami penyebab kenaikan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan dan menurunkan tingkat kejahatan di Indonesia.

Menurut Beczi (1999), berbagai faktor dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk faktor demografi seperti peningkatan jumlah penduduk setiap tahun. Ketika kesempatan kerja semakin terbatas dan upah yang ditawarkan rendah, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih ketat, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kesenjangan sosial.

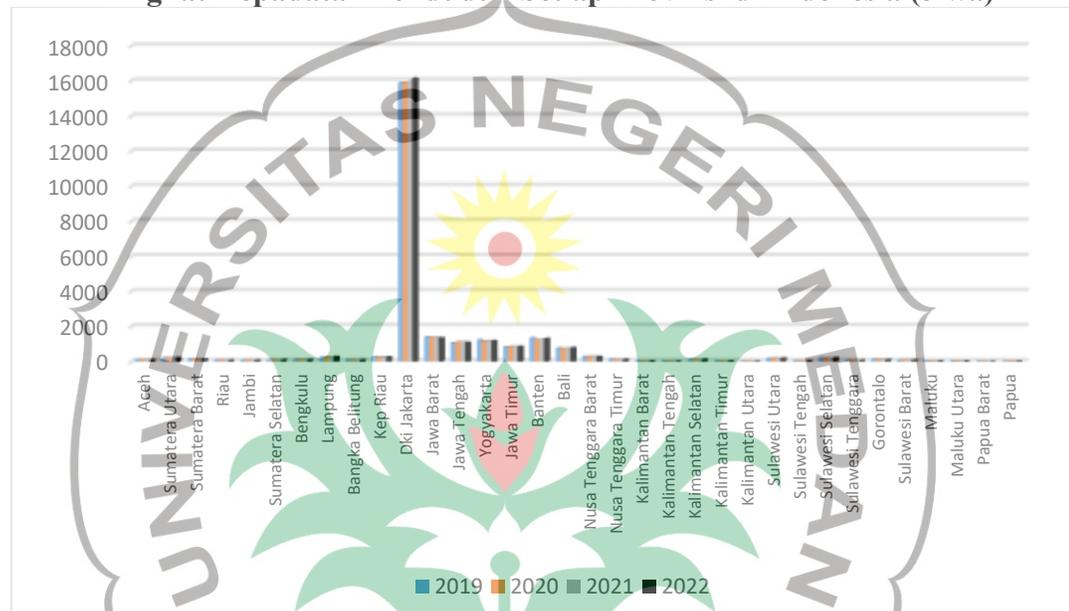
Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) yang dipopulerkan oleh Becker (1968) menyatakan bahwa tindak kriminal lebih sering terjadi di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi karena keuntungan dari hasil kejahatan lebih besar, sementara risiko atau biaya tertangkap lebih kecil. Ini berarti bahwa kriminalitas dianggap lebih menguntungkan di daerah yang padat penduduk. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan tidak merata distribusinya juga menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik.

Pembangunan dan perkembangan pesat di suatu daerah sering kali menarik banyak orang untuk bermigrasi ke sana dengan harapan menemukan lebih banyak lapangan pekerjaan. Namun, pada kenyataannya, seringkali jumlah pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang datang (Sabiq, 2019).

Daerah dengan populasi yang padat cenderung mengalami berbagai masalah seperti kesulitan ekonomi, kurangnya kesejahteraan, kebutuhan pangan yang tidak terpenuhi, serta rendahnya tingkat keamanan. Semua faktor ini dapat memicu meningkatnya tindakan kriminal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kepadatan penduduk diukur berdasarkan jumlah penduduk per satuan luas wilayah..

Adapun tingkat kepadatan penduduk di beberapa provinsi di Indonesia cukup beragam dimana pulau jawa sebagai pulau dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia.

Grafik 1.3
Tingkat Kepadatan Penduduk Setiap Provinsi di Indonesia (Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan grafik tersebut, terjadi dapat dilihat tingkat kepadatan setiap provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat di tahun 2022 di sebagian besar provinsi di Indonesia. Tingkat kepadatan tertinggi berada di pulau jawa secara menyeluruh terkhusus provinsi DKI Jakarta yang mana pada tahun 2022 tingkat kepadatannya mencapai angka 16.158 (per 100.000 penduduk).

Hal tersebut disebabkan Daerah IbuProvinsi berada di Provinsi DKI Jakarta yang memicu terjadinya urbanisasi ke daerah tersebut. Sementara tingkat kepadatan terendah berada di provinsi kalimantan utara dimana pada tahun 2022 tingkat kepadatannya hanya 10 jiwa (per 100.000 penduduk).

Sementara itu tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 sebanyak 93 jiwa (per 100.000 penduduk) lalu meningkat di tahun 2022 menjadi

100 jiwa (per 100.000 penduduk). Namun saat tingkat kepadatan Sumatera Selatan mengalami kenaikan di sisi lain crime rate Sumatera Selatan justru mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022, tingkat crime rate mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni dari sebesar 153 hingga sebesar 134 (per 100.000 penduduk). Adapun Provinsi Papua Barat dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni hanya 9 sampai 12 jiwa (per 100.000 penduduk) justru menjadi provinsi dengan tingkat crime yang tinggi yakni mencapai 359 jiwa (per 100.000 penduduk).

Berdasarkan data tersebut hal ini tidak sejalan dengan teori hukum Durkheim yang menyatakan kepadatan penduduk membuat persaingan yang semakin ketat dan meningkat hingga akhirnya mengakibatkan sebagian masyarakat memenangkan persaingan dengan melakukan tindakan kriminal. Maka dari itu seharusnya peningkatan kepadatan penduduk diikuti pula dengan kenaikan tingkat kriminalitas.

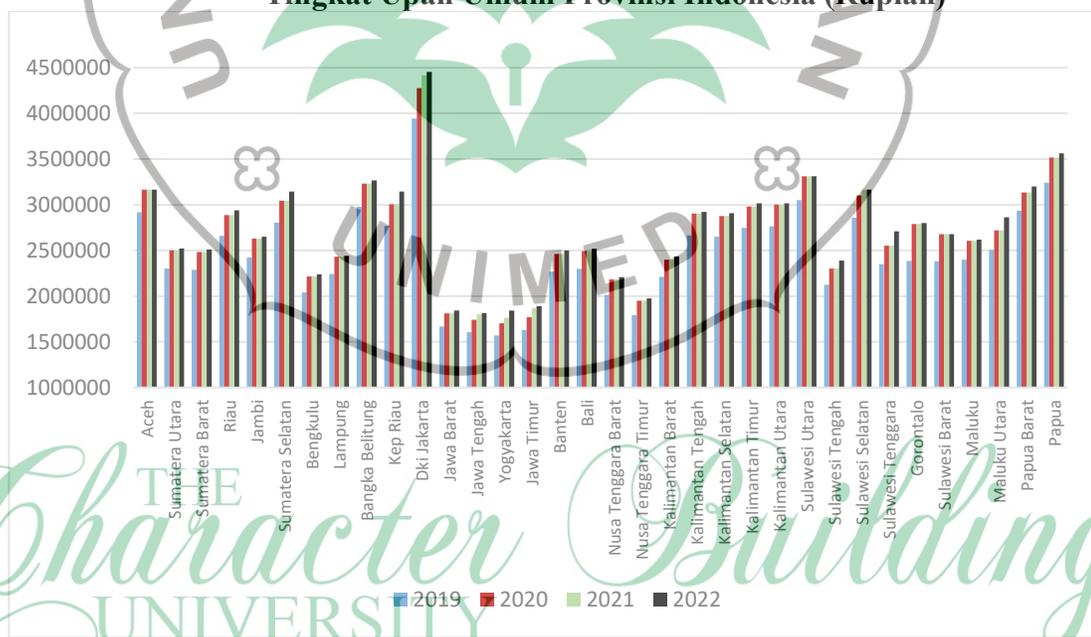
Pada penelitian Sabiq (2019) menyatakan bahwa kepadatan penduduk memberikan pengaruh signifikan terhadap tindakan kriminal namun pada penelitian (Yunifah 2022) Variabel kepadatan penduduk berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kriminalitas di Pulau Sumatera.

Kepadatan penduduk yang disebabkan oleh maraknya urbanisasi memicu persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di daerah tersebut. Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu wilayah akan mempengaruhi besaran tingkat upah yang telah diatur oleh pemerintah. Ketika jumlah pencari kerja melebihi jumlah kesempatan kerja yang tersedia, upah cenderung menurun karena banyaknya tenaga kerja yang bersedia bekerja dengan bayaran lebih

rendah. Sebaliknya, dalam kondisi pasar tenaga kerja yang kekurangan tenaga kerja, upah cenderung meningkat (Mentari dan Yasa, 2013).

Upah merupakan hak dari pekerja yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya (Wiwoho 2021). Adapun tingkat upah minimum di beberapa provinsi di Indonesia memiliki tingkat upah yang berbeda dimana Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat upah minimum tertinggi di Indonesia yang dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 1.4
Tingkat Upah Umum Provinsi Indonesia (Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan grafik tersebut, terjadi dapat dilihat tingkat upah setiap provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir di sebagian besar provinsi di Indonesia. Provinsi Jakarta menjadi daerah dengan tingkat upah minimum tertinggi selama empat tahun berturut turut yang mana pada tahun 2022 tingkat upahnya sebesar

Rp. 4.452.724 yang mana hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan biaya hidup di Provinsi DKI Jakarta. Sementara Provinsi Yogyakarta menjadi daerah dengan tingkat upah terendah yang mana pada tahun 2022 tingkat upah minimum Provinsi Yogyakarta hanya sebesar Rp. 1.840.951. Hal ini dikarenakan Yogyakarta tidak memiliki banyak lapangan kerja dimana persaingan antar perusahaan dalam mendapatkan tenaga kerja menjadi tidak ketat, sehingga upah yang ditawarkan juga rendah.

Berdasarkan data tingkat upah ekonomi Provinsi Yogyakarta tahun 2021 sebesar Rp. 1.765.000 lalu meningkat di tahun 2022 menjadi Rp. 1.840.951. Namun saat tingkat upah Provinsi Yogyakarta mengalami peningkatan di sisi lain tingkat resiko penduduk terkena kejahatan di Provinsi Yogyakarta justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan pula dimana pada tahun 2021 tingkat risiko penduduk terkena kejahatan sebesar 123 jiwa per 100.000 penduduk lalu meningkat menjadi 225 jiwa per 100.000 penduduk di tahun 2022 .

Perbedaan hasil penelitian antara Adri et al. (2019) dan Hardianto (2009) mengenai hubungan antara upah dan tingkat kriminalitas di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan hasil temuan penelitian. Menurut penelitian Adri et al. (2019), variabel upah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Ini berarti peningkatan upah cenderung berhubungan dengan penurunan tingkat kriminalitas. Penelitian ini mungkin menunjukkan bahwa upah yang lebih tinggi dapat mengurangi insentif untuk terlibat dalam kejahatan, karena orang-orang tidak memiliki dorongan untuk mencari sumber penghasilan alternatif yang ilegal.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Hardianto (2009) menyimpulkan bahwa tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketika upah minimum provinsi rendah, masyarakat mungkin cenderung mencari sumber penghasilan tambahan melalui kegiatan yang tidak legal atau kriminal. Hal ini mungkin terjadi karena upah yang rendah membuat sulit bagi individu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak, mendorong mereka untuk mencari cara lain untuk mendapatkan penghasilan.

Berdasarkan data tersebut hal ini tidak sejalan teori pilihan rasional oleh (Becker 1968) yang menyimpulkan bahwa semakin besarnya perbedaan income dari pekerjaan illegal dengan opportunity cost (pendapatan dari pekerjaan legal) maka akan menjadi insentif dan mendorong terjadinya kriminalitas. Rendahnya upah yang diberikan akan menyebabkan pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari secara ekonomi.

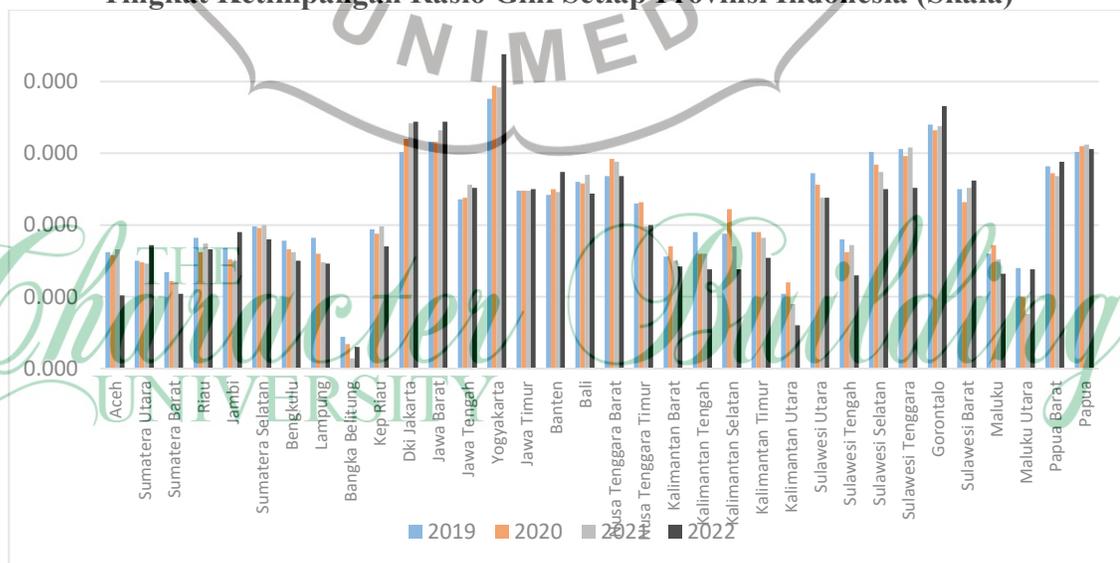
Para pelaku kejahatan umumnya mengalami tekanan psikologis karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang tidak dapat terpenuhi karena penghasilan yang tidak memadai. Adapun dengan seiring bertambahnya pula ketimpangan pendapatan di masyarakat karena belum optimalnya fungsi elemen masyarakat dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas.

Teori pilihan rasional yang diperkenalkan oleh Becker pada tahun 1968 mengajukan bahwa kesenjangan pendapatan dapat mempengaruhi tingkat kejahatan dalam suatu daerah. Menurut teori ini, orang yang mendapatkan upah rendah dari sektor legal mungkin merasa terdorong untuk melakukan aksi kejahatan, terutama jika

mereka melihat orang lain dalam komunitas mereka memiliki harta yang sangat berharga. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa kejahatan dapat memberikan "return" yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan legal yang membayar rendah. Oleh karena itu, daerah yang memiliki kesenjangan pendapatan yang besar cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi.

Ketimpangan pendapatan sendiri disebabkan oleh konsentrasi kegiatan ekonomi di beberapa wilayah yang mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan di suatu negara. Menurut Todaro dan Smith (2011), ketimpangan ekonomi merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi.

Grafik 1.5
Tingkat Ketimpangan Rasio Gini Setiap Provinsi Indonesia (Skala)



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan grafik tersebut, terjadi dapat dilihat tingkat ketimpangan distribusi pendapatan setiap provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi selama empat tahun

terakhir di sebagian besar provinsi di Indonesia. Semakin tinggi nilai koefisien gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dan sebaliknya semakin rendah nilai koefisien indeks gini semakin merata pula distribusi pendapatan.

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi selama empat tahun berturut turut yang mana pada tahun 2022 tingkat ketimpangannya hampir mendekati angka 0,5 yakni di angka 0,459. Ekonom dari *Center of Economic and Law Studies (Celios)*, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengungkapkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan di Yogyakarta. Salah satunya yakni karena Yogyakarta adalah Provinsi pelajar dengan banyak universitas yang menjadi tujuan para mahasiswa. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan yang cukup lebar. Terlebih lagi, banyak perguruan tinggi yang memasang tarif semakin tinggi, dan jumlah beasiswa bagi orang yang tidak mampu di perguruan tinggi juga tidak terlalu besar.

Adapun berdasarkan data tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh mengalami penurunan pada tahun 2021 sebanyak 0,323 menjadi sebesar 0,291 pada tahun 2022 yang dapat diasumsikan bahwa tingkat pemerataan distribusi pendapatan di Provinsi Aceh semakin meningkat. Namun ketika tingkat pemerataan pendapatan Provinsi Aceh membaik di sisi lain tingkat resiko penduduk terkena kejahatan di Provinsi Aceh justru mengalami peningkatan dimana tingkat resiko penduduk terkena kejahatan di mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni dari sebesar 125 ditahun 2021 kemudian meningkat hingga sebesar 190 pada tahun 2022. Adapun Provinsi Papua Barat dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni hanya 9 sampai 12

jiwa (per 100.000 penduduk) justru menjadi provinsi dengan tingkat crime yang tinggi yakni mencapai 359 jiwa (per 100.000 penduduk).

Berdasarkan data tersebut hal ini tidak sejalan juga dengan teori becker dan teori sosialis menyatakan bahwa kejahatan muncul sebagai hasil dari ketidakseimbangan tekanan ekonomi dalam masyarakat. Teori Sosialis mengindikasikan bahwa untuk melawan kejahatan, perlu dilakukan perbaikan dalam aspek ekonomi. Secara sederhana, peningkatan kemakmuran, menciptakan keseimbangan, dan menegakkan keadilan sosial dianggap dapat mengurangi tingkat kejahatan (Situmaeng 2021).

Menurut penelitian Rina (2019), Hasil penelitian menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi memberikan pengaruh signifikan terhadap tindakan kriminal sementara pada penelitian Edwart (2019), Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh tidak signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh variabel sosial ekonomi, yaitu kepadatan penduduk, upah minimum provinsi (UMP), dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kriminalitas di setiap provinsi di Indonesia.

Untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut, digunakan model regresi data panel (pooled data). Model regresi pooled data adalah metode analisis regresi yang diterapkan untuk mengamati pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, ditemukan masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kriminalitas tiap-tiap provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi dan tahun 2022 terjadi kenaikan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi di sebagian besar provinsi di Indonesia.
2. Kepadatan penduduk yang mengalami fluktuasi dan meningkat sehingga dikhawatirkan dapat memicu kenaikan kriminalitas.
3. Upah minimum yang cenderung meningkat tiap provinsi belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengurangi tingkat kriminalitas.
4. Terjadinya peningkatan ketimpangan rasio gini di Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah diberikan agar penelitian lebih terfokus dan terarah, batasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Tingkat Kriminalitas serta variabel independen Kepadatan Penduduk, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Ketimpangan pendapatan Indonesia tahun 2019-2022.
2. Penelitian ini mengkaji pengaruh upah minimum melalui sisi permintaan pasar tenaga kerja.
3. Data variabel yang digunakan merupakan data 34 provinsi yang ada di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas setiap provinsi di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat kriminalitas setiap provinsi di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kriminalitas setiap provinsi di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh kepadatan penduduk, upah minimum provinsi, dan ketimpangan pendapatan secara simultan terhadap tingkat kriminalitas di setiap provinsi Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepadatan penduduk terhadap tingkat kriminalitas setiap provinsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi terhadap tingkat kriminalitas setiap provinsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kriminalitas setiap provinsi di Indonesia.

4. Untuk mengetahui pengaruh kepadatan penduduk, upah minimum provinsi, dan ketimpangan pendapatan secara simultan terhadap tingkat kriminalitas setiap provinsi di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan mamfaat antara lain:

1. Bagi Pihak Akademik

Bagi pihak akademik, penelitian ini sebagai masukan dan saran untuk meningkatkan pemahaman mengenai kepadatan penduduk, upah minimum provinsi dan ketimpangan pendapatan serta kriminalitas di Indonesia.

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif dalam menangani fenomena peningkatan kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh kepadatan penduduk, upah minimum provinsi, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas dapat membantu pemerintah dalam merancang strategi yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi tingkat kriminalitas.